

ABSTRAK

Penolakan klaim asuransi properti masih menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam praktik perasuransian di Indonesia dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tertanggung. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi tawar antara tertanggung dan perusahaan asuransi, khususnya dalam penggunaan polis asuransi yang bersifat baku dan disusun secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum asuransi properti di Indonesia, mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal penolakan klaim asuransi properti, serta menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3663 K/Pdt/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan pertimbangan hakim untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum asuransi properti di Indonesia secara normatif telah memberikan dasar perlindungan bagi tertanggung, namun dalam praktik masih ditemukan penolakan klaim yang merugikan tertanggung dan tidak selalu sejalan dengan prinsip itikad baik. Perlindungan hukum bagi tertanggung dapat ditempuh melalui mekanisme preventif dan represif, baik melalui lembaga non-litigasi maupun pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3663 K/Pdt/2024 menegaskan bahwa perusahaan asuransi tidak dapat secara sepihak menolak klaim dengan alasan formalitas prosedural, serta memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak tertanggung dalam sengketa asuransi properti.

Kata Kunci

Asuransi Properti, Penolakan Klaim, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung

ABSTRACT

The rejection of property insurance claims remains a common issue in insurance practice in Indonesia and often results in legal uncertainty for the insured. This problem is primarily caused by the imbalance of bargaining power between the insured and insurance companies, particularly due to the use of standard-form insurance policies drafted unilaterally by insurers. Such conditions place the insured in a vulnerable position when disputes arise regarding claim settlements. This study aims to analyze the legal regulation of property insurance in Indonesia, examine the forms of legal protection available to the insured in cases of claim rejection, and assess the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 3663 K/Pdt/2024. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, supported by secondary and tertiary legal materials. The analysis is conducted qualitatively through the interpretation of legal norms and judicial reasoning to address the research issues. The findings indicate that, although the legal framework governing property insurance in Indonesia has normatively provided protection for the insured, claim rejections that disadvantage the insured are still frequently encountered in practice and are not always consistent with the principle of utmost good faith. The Supreme Court Decision Number 3663 K/Pdt/2024 affirms that insurance companies may not unilaterally reject claims based solely on procedural formalities, thereby strengthening legal certainty and the protection of the insured's rights in property insurance disputes.

Keywords

Property Insurance; Claim Rejection; Legal Protection; Breach of Contract; Supreme Court Decision